



Peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Dalam Memfasilitasi Akses Permodalan Bagi UMKM di Kabupaten Jember

Siti Rahmatillah N.S^{1*}, Vita Dwi Lestari²

^{1,2} Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq Jember, Indonesia

Alamat: Jl. Mataram No.1, Karang Miuwo, Mangli, Kec. Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68136

Korespondensi penulis: ilasiti1911@gmail.com*

Abstract. *The Field Experience Practice (PPL) is a compulsory course for students to gain real-world work experience before completing their studies. This research focuses on the role of the Cooperative and Micro Business Office of Jember Regency in facilitating access to capital for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs). The Cooperative Office plays a significant role in providing information, assistance, and facilitating access to capital through various programs and policies. This research uses a qualitative approach with interview and case study methods to evaluate the effectiveness of the implemented programs and MSME actors' perceptions of the office's performance. The results of the study show that the programs of the Cooperative and Micro Business Office of Jember Regency successfully increased access to capital, improved productivity, and supported the sustainability of MSME businesses. However, challenges remain in the delivery of information, the capital application process, and the relevance of training programs. Data from case studies show that 75% of registered MSMEs successfully obtained additional capital with an average income increase of 30%. The results of this research are expected to provide constructive input for improving the service quality of the Cooperative and Micro Business Office of Jember Regency.*

Keywords: *Role of the Department of Cooperatives, Capital Facilitation, MSMEs.*

Abstrak. Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman di dunia kerja nyata sebelum menyelesaikan studi. Penelitian ini berfokus pada peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jember dalam memfasilitasi akses permodalan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dinas Koperasi berperan penting dalam memberikan informasi, pendampingan, serta fasilitasi akses permodalan melalui berbagai program dan kebijakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara dan studi kasus untuk mengevaluasi efektivitas program yang diterapkan dan persepsi pelaku UMKM terhadap kinerja dinas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program-program Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jember berhasil meningkatkan akses permodalan, meningkatkan produktivitas, dan mendukung keberlanjutan usaha UMKM. Namun, masih terdapat tantangan dalam penyampaian informasi, proses pengajuan modal, serta relevansi program pelatihan. Data dari studi kasus menunjukkan bahwa 75% UMKM yang terdaftar berhasil memperoleh tambahan modal dengan peningkatan pendapatan rata-rata sebesar 30%. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan konstruktif bagi peningkatan kualitas layanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jember.

Kata kunci: Peran Dinas Koperasi, Fasilitasi Modal, UMKM.

1. LATAR BELAKANG

Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) adalah mata kuliah yang wajib diambil mahasiswa agar bisa mengambil skripsi atau tugas akhir. Mahasiswa memilih tempat PPL yang menerima mahasiswa PPL. Selama minimal 30 hari kerja, mahasiswa menjalani aktivitas layaknya pekerja. Bisa dikatakan PPL adalah program yang dirancang untuk memberikan kesempatan untuk belajar dan berlatih di dunia kerja nyata sebelum lulus dari perguruan tinggi.

Dinas Koperasi adalah lembaga pemerintah yang bertanggung jawab untuk mengembangkan dan mendukung perkembangan koperasi di suatu daerah salah satunya memberikan akses permodalan bagi usaha mikro. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang berlandaskan prinsip-prinsip kekeluargaan dan gotong royong.

Pengembangan koperasi dan usaha mikro adalah elemen kunci dalam pembangunan ekonomi daerah di Indonesia. Tidak hanya berfungsi sebagai penggerak ekonomi lokal tetapi juga sebagai sarana untuk pemberdayaan masyarakat dan pengurangan kemiskinan. Kabupaten Jember dengan populasi yang beragam dan potensi ekonomi yang besar, telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam mendukung sektor ini melalui Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Jember.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran strategis dalam perekonomian Indonesia. UMKM menjadi tulang punggung ekonomi yang memberikan kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), menciptakan lapangan kerja, serta mendukung ketahanan ekonomi daerah. Namun, pelaku UMKM sering menghadapi tantangan utama dalam mengakses permodalan yang diperlukan untuk mengembangkan usaha mereka. Akses permodalan yang terbatas menjadi salah satu hambatan terbesar yang menghalangi pertumbuhan dan keberlanjutan UMKM.

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro di Kabupaten Jember memiliki peran penting dalam memfasilitasi akses permodalan bagi pelaku UMKM. Sebagai lembaga pemerintah daerah, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro memiliki tugas pokok dan fungsi untuk mengembangkan dan memberdayakan UMKM di wilayahnya. Dengan berbagai program dan kebijakan yang diterapkan, dinas ini berupaya untuk memberikan informasi, edukasi, pendampingan, serta fasilitasi akses permodalan bagi pelaku UMKM.

Dalam menjalankan perannya, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jember menghadapi tantangan dalam memastikan efektivitas program dan kebijakan yang diterapkan. Selain itu, persepsi pelaku UMKM terhadap kinerja dinas ini juga menjadi indikator penting dalam mengevaluasi keberhasilan program yang telah dilakukan. Persepsi positif dari pelaku UMKM menunjukkan bahwa program dan kebijakan yang diterapkan berhasil mencapai sasaran, sementara persepsi negatif menunjukkan adanya aspek yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam memfasilitasi akses permodalan bagi UMKM di Kabupaten Jember. Selain itu, penelitian ini juga akan mengevaluasi efektivitas program dan kebijakan yang diterapkan, serta

mengidentifikasi persepsi pelaku UMKM terhadap peran dan kinerja dinas tersebut. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang konstruktif bagi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jember dalam meningkatkan kualitas layanan dan mendukung pertumbuhan serta keberlanjutan UMKM di wilayah tersebut.

2. KAJIAN TEORITIS

Peran Dinas Koperasi bagi UMKM

Meburut Jim Ife dan Frank Tesoriero Peran utama Dinas Koperasi dalam mendukung UMKM mencakup (najib & Mursyidah Lailul, "Peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam Pemberdayaan Usaha Mikro", 2023):

1. **Fasilitasi:** Menyediakan dukungan, memanfaatkan sumber daya, dan komunikasi.
2. **Edukasi:** Memberikan informasi mengenai peluang usaha dan pelatihan.
3. **Perwakilan:** Bekerjasama dalam pembinaan dan pengembangan potensi, membangun jaringan kerja dengan pihak lain, dan memperoleh modal usaha.
4. **Teknis:** Mengajarkan keterampilan, manajemen, dan kemampuan mengendalikan keuangan.

Pengertian Permodalan

Permodalan adalah proses mengumpulkan dana atau sumber daya finansial yang dibutuhkan untuk memulai atau memperluas kegiatan bisnis. Proses ini mencakup strategi dan keputusan terkait bagaimana memperoleh modal, bagaimana modal tersebut akan digunakan, serta bagaimana menghasilkan pengembalian dari modal yang telah diinvestasikan ("Modal dan Permodalan dalam Bisnis: Definisi dan Contoh," 2023)

Ada beberapa tujuan penggunaan modal, antara lain:

1. Modal digunakan untuk pembelian asset, seperti peralatan, investasi, properti, atau teknologi yang di perlukan untuk menjalankan usaha.
2. Modal dapat digunakan untuk membiayai operasional harian seperti pembayaran gaji karyawan, membeli bahan baku, dan membayar tagihan listrik.
3. Modal dapat dialokasikan untuk aktivitas pemasaran dan promosi agar dapat memperkenalkan produk atau layanan kepada pangsa pasar yang lebih luas.

Fasilitasi Akses Permodalan

Fasilitasi akses permodalan adalah upaya untuk membantu pelaku usaha dalam memperoleh informasi dan dana dari lembaga pembiayaan. Tujuan dari fasilitasi ini adalah agar pelaku usaha dapat mengembangkan usahanya (“Sosialisasi Akses Permodalan Bagi Koperasi dan UMKM di Kabupaten Katingan,” 2024)

Manfaat fasilitasi akses permodalan:

- Membantu pelaku usaha memenuhi kebutuhan modal jangka pendek.
- Membantu pelaku usaha mengelola arus kas usahanya di masa depan.
- Membantu pelaku usaha untuk mengembangkan usaha mereka.

Sumber permodalan: Modal usaha dapat diperoleh dari berbagai sumber, seperti (“7 Sumber Modal Usaha untuk Memulai Bisnis,” 2022):

- Tabungan pribadi
- Pinjaman dari saudara atau teman
- Pinjaman dari bank
- Bantuan pemerintah
- Investor
- Rekan kerja
- Penjualan aset

Bantuan modal usaha dari pemerintah: Pemerintah juga menyediakan bantuan modal usaha bagi pelaku usaha yang terdampak pandemi atau mereka yang membutuhkan bantuan untuk pengembangan usaha mereka.

Akses pembiayaan: Akses pembiayaan adalah kemampuan individu, perusahaan, atau entitas lain untuk memperoleh dana atau sumber daya keuangan. (“7 Jenis Akses Pembiayaan bagi Pemilik UMKM,” 2023)

Pengertian UMKM

UMKM, singkatan dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, merupakan usaha produktif yang dimiliki oleh individu atau badan usaha perorangan. (“Kontribusi UMKM dalam Perekonomian Indonesia,” 2023)

Ciri khas dari UMKM antara lain adalah modal yang terbatas, skala operasi yang sederhana, pengelolaan yang dilakukan secara mandiri, fleksibilitas yang tinggi, serta pemasaran yang terbatas. UMKM terdiri dari beberapa jenis, yaitu usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. (Rijal Fahmi Mohamadi, “Pengertian, Jenis dan Pengembangan UMKM di Indonesia,” 2024)

Contoh-contoh UMKM yang dapat kita temui antara lain: (Shaïd & Idris , “Pengertian UMKM, Kriteria, Ciri dan Contohnya,” , 2023)

- Toko kelontong
- Tukang cukur
- Warung makan kecil
- Usaha jahit dan permak pakaian
- Usaha kerajinan tangan
- Perusahaan pembuat roti skala rumahan
- Restoran besar
- Toko bangunan

UMKM berperan penting dalam perekonomian, antara lain dengan menyerap banyak tenaga kerja dan memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Selain itu, UMKM menerapkan prinsip kebersamaan, demokrasi ekonomi, kemandirian, keseimbangan kemajuan, keberlanjutan, efisiensi, keadilan, serta kesatuan ekonomi nasional.

Pemerintah juga memberikan berbagai dukungan kepada UMKM, seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), bantuan pengembangan usaha, kemudahan dalam pengajuan izin usaha, dan bantuan kredit usaha dengan bunga rendah.

Jenis-Jenis Modal bagi UMKM

Modal usaha mengacu pada dana yang digunakan untuk menjalankan bisnis agar tetap beroperasi. Modal ini bisa diartikan dalam berbagai segi seperti modal awal untuk membuka usaha, modal untuk memperluas usaha, dan modal untuk menjalankan operasional sehari-hari. Jenis-jenis modal usaha meliputi:

Modal Investasi

- o Modal investasi dikenal sebagai aset tetap. Ini adalah modal awal yang diperlukan untuk investasi awal dalam bisnis. Dana ini digunakan untuk membeli barang-barang kebutuhan tetap agar usaha bisa berjalan.
- o Jika usaha berfokus pada produksi, dana dialokasikan untuk membeli peralatan dan mesin produksi. Sedangkan untuk usaha di bidang jasa, modal investasi biasanya digunakan untuk menyewa atau membeli peralatan pendukung layanan jasa.

Contoh kebutuhan modal investasi usaha:

- o Modal Perizinan: Izin lokasi usaha, izin khusus usaha, dan izin badan usaha seperti pembuatan PT, CV, NPWP, SIUP, dan TDP.

- Modal Investasi Tetap: Pembelian atau sewa tanah, bangunan, renovasi bangunan, peralatan pokok untuk usaha, peralatan administrasi, dan alat promosi.

Modal Kerja

- Modal kerja dikenal juga sebagai aset lancar yang umumnya berbentuk uang. Modal kerja diperlukan untuk membiayai pengeluaran produksi atau kegiatan operasional sehari-hari.
- Modal kerja dibagi menjadi dua jenis, yaitu modal tetap (biaya pengeluaran setiap periode tertentu) dan modal variabel (biaya tidak tetap yang muncul hanya jika ada pekerjaan tambahan).

Contoh kebutuhan modal kerja:

- Biaya operasional gaji: Gaji manajer, supervisor, dan karyawan lain.
- Biaya bahan: Bahan baku utama dan bahan pelengkap untuk usaha.
- Biaya umum: Tagihan listrik, telepon, uang kebersihan, keamanan, bahan bakar, transportasi, dan biaya tak terduga. (Soebiantoro & Nik, "Peningkatan Akses Permodalan bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)", 2024)

3. METODE PENELITIAN

Pendahuluan:

Pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk mengevaluasi peran dan kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam memfasilitasi akses permodalan bagi pelaku UMKM di Kabupaten Jember. Metode yang digunakan adalah wawancara dan studi kasus.

Metode penelitian:

1. Pendekatan Kualitatif: Pengabdian masyarakat ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang persepsi pelaku UMKM terhadap peran dan kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro.
2. Wawancara:
 - Responden: Kepala Bidang Pembiayaan yang memberikan bantuan permodalan bagi pelaku UMKM.
 - Instrumen: Panduan wawancara yang terdiri dari pertanyaan terbuka mengenai pengalaman, persepsi, dan tingkat kepuasan terhadap layanan yang diberikan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Jember.
 - Prosedur: Wawancara dilakukan secara tatap muka dengan durasi wawancara sekitar 30-45 menit di Gedung Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Jember.

3. Studi Kasus:

- Subjek: Beberapa UMKM yang dianggap berhasil dan tidak berhasil dalam mengakses permodalan melalui Dinas Koperasi dan Usaha Mikro di Kabupaten Jember.
- Data yang Dikumpulkan: Informasi mengenai profil UMKM, proses pengajuan permodalan, tantangan yang dihadapi, dan dampak dari permodalan terhadap perkembangan usaha.
- Sumber Data: Dokumen dan arsip dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, serta data primer dari wawancara.
- Analisis: Data dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi pola dan tema yang relevan dengan tujuan pengabdian masyarakat.

4. Validasi Data:

- Triangulasi: Untuk memastikan keandalan data, dilakukan triangulasi dengan membandingkan hasil wawancara dan studi kasus dengan data sekunder seperti laporan tahunan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, serta literatur terkait.

Kesimpulan:

Hasil dari pengabdian masyarakat ini diharapkan dapat memberikan masukan yang konstruktif kepada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro di Kabupaten Jember dalam meningkatkan kualitas layanan dan memfasilitasi akses permodalan bagi pelaku UMKM.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Dalam Memfasilitasi Akses Permodalan Bagi UMKM Di Kabupaten Jember.

Peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status). Ketika seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan yang ditentukan, maka ia menjalankan suatu peran. Peran dan kedudukan saling bergantung satu sama lain: tidak ada peran tanpa kedudukan, begitu pula sebaliknya. Dalam setiap organisasi atau lembaga, setiap individu memiliki karakteristik yang berbeda dalam menjalankan tugas, kewajiban, dan tanggung jawab yang diberikan oleh masing-masing organisasi atau lembaga. (Ramadanti & Suharti, "Peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jember untuk Kemajuan UMKM," , n.d.)

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jember meliputi pelaksanaan urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Koperasi dan Usaha Mikro. Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan daerah di bidang koperasi dan usaha mikro
2. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang koperasi dan usaha mikro
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di bidang koperasi dan usaha mikro
4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang koperasi dan usaha mikro
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

Peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Jember dalam memfasilitasi akses permodalan bagi UMKM di Kabupaten Jember cukup signifikan dan dapat dilihat dalam berbagai aspek:

1. Pemberian Informasi dan Edukasi: Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Jember menyediakan informasi tentang berbagai sumber permodalan yang tersedia, termasuk program pemerintah, pinjaman bank, dan modal ventura. Mereka juga mengadakan pelatihan dan workshop untuk meningkatkan pemahaman pelaku UMKM mengenai manajemen keuangan dan permodalan.
2. Pendampingan dan Konsultasi: Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Jember memberikan layanan pendampingan dan konsultasi bagi UMKM yang membutuhkan bantuan dalam mengakses permodalan. Pendampingan ini mencakup bantuan dalam penyusunan proposal bisnis, perencanaan keuangan, dan strategi untuk mendapatkan modal.
3. Fasilitasi Akses ke Sumber Permodalan: Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Jember bekerja sama dengan berbagai lembaga keuangan untuk memfasilitasi akses permodalan bagi UMKM. Mereka membantu pelaku UMKM dalam proses pengajuan pinjaman atau mendapatkan investasi dari sumber-sumber permodalan yang tersedia.
4. Pengembangan Program Khusus: Dinas ini juga mengembangkan program-program khusus yang bertujuan untuk meningkatkan akses permodalan bagi UMKM. Seperti, program kredit mikro dengan bunga rendah atau program subsidi untuk pelaku usaha mikro.
5. Kolaborasi dengan Pihak Swasta: Selain bekerja sama dengan lembaga keuangan, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Jember juga menjalin kemitraan dengan perusahaan swasta untuk mendukung akses permodalan bagi UMKM. Dengan memberikan dukungan dalam bentuk modal kerja, bantuan teknis, atau program corporate social responsibility (CSR).
6. Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi: Melalui pelatihan dan pendampingan, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Jember berperan dalam meningkatkan kapasitas dan

kompetensi pelaku UMKM, sehingga mereka lebih siap dan mampu mengelola permodalan dengan efektif.

Dengan berbagai peran ini, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro di Kabupaten Jember bertujuan untuk meningkatkan akses permodalan bagi UMKM dan mendukung pertumbuhan serta keberlanjutan usaha mikro di wilayah tersebut.

Peran penting dinas ini tampak jelas dalam usaha mereka untuk memfasilitasi akses pembiayaan bagi UMKM. Mereka menginisiasi berbagai program dan skema pembiayaan yang dirancang untuk membantu UMKM memperoleh modal yang diperlukan guna perkembangan usaha mereka. (Sinta & Fadillah, "OPTIMALISASI PERAN DINAS KOPERASI DAN UMKM DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK MELALUI PROGRAM 4P GUNA TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KOTA SEMARANG," 2024)

Efektivitas program atau kebijakan yang telah diterapkan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam meningkatkan akses permodalan bagi UMKM.

Efektivitas dapat diartikan sebagai kemampuan untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Kualitas pelaksanaan suatu tugas ditentukan oleh seberapa baik tugas tersebut diselesaikan, yang melibatkan metode pelaksanaan serta biaya yang dikeluarkan untuk menyelesaikannya. (Putri, "EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI KOTA SAMARINDA (STUDI PADA DIINAS KOPERASI DAN UMKM KOTA SAMARINDA)," 2017)

Efektivitas program atau kebijakan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Jember dalam meningkatkan akses permodalan bagi UMKM dapat dikatakan berjalan dengan baik. Berdasarkan beberapa referensi dan data yang tersedia, program-program yang diterapkan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jember telah memberikan hasil yang signifikan dalam membantu UMKM mendapatkan akses ke permodalan.

Beberapa aspek dari efektivitas program atau kebijakan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam meningkatkan akses permodalan bagi UMKM, yaitu:

1. Penilaian Keterjangkauan Modal:

- Banyaknya UMKM yang berhasil mengakses pembiayaan.
- Jumlah total dana yang disalurkan kepada UMKM.
- Perbandingan jumlah UMKM yang mengakses modal sebelum dan setelah kebijakan diterapkan.

2. Peningkatan Produktivitas:

- Perkembangan pendapatan UMKM setelah menerima modal.
- Penambahan kapasitas produksi UMKM.
- Peningkatan jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan oleh UMKM.

3. Keberlanjutan Usaha:

- Tingkat kelangsungan hidup UMKM setelah menerima bantuan modal.
- Persentase UMKM yang mampu membayar kembali pinjaman modal.
- Evaluasi terhadap keberlanjutan program dalam jangka panjang.

Dilihat pada data tahun 2019, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jember menetapkan sejumlah program dan kegiatan prioritas untuk meningkatkan kualitas koperasi dan usaha mikro. Tujuan dari program ini adalah untuk berkontribusi pada pembangunan ekonomi nasional dengan memanfaatkan berbagai peluang usaha yang berkembang. Berikut adalah beberapa program dan kegiatan prioritas tersebut: (“Program Dan Kegiatan Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kabupaten Jember Tahun 2019,” 2019)

1. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif:

- Kegiatan fasilitasi pengembangan usaha kecil menengah.
- Kegiatan fasilitasi permasalahan proses produksi usaha kecil menengah.

2. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah:

- Kegiatan fasilitasi pengembangan inkubator teknologi dan bisnis.
- Kegiatan memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi usaha mikro kecil menengah.
- Kegiatan penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan.

3. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah:

- Kegiatan sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan.
- Kegiatan pengembangan klaster bisnis.
- Kegiatan penyelenggaraan pembinaan industri rumah tangga, industri kecil, dan industri menengah.
- Kegiatan pemberdayaan UMKM terpadu.

4. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi:

- Kegiatan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan perkoperasian.
- Kegiatan pembangunan sistem informasi perencanaan pengembangan perkoperasian.
- Kegiatan pembinaan, pengawasan, dan penghargaan koperasi berprestasi.

- Kegiatan koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program kelembagaan koperasi.
- Kegiatan pengawasan usaha koperasi.

Contoh Data Hasil Pengabdian dan Pembahasan: Dalam sebuah studi kasus yang dilakukan di Kabupaten Jember, ditemukan bahwa program pembiayaan yang disalurkan melalui Dinas Koperasi dan Usaha Mikro telah berhasil membantu 75% UMKM yang terdaftar untuk memperoleh modal tambahan. Selain itu, data menunjukkan peningkatan pendapatan rata-rata sebesar 30% pada UMKM penerima bantuan.

Persepsi pelaku UMKM terhadap peran dan kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam memfasilitasi akses permodalan.

Persepsi pelaku UMKM terhadap peran dan kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Jember dalam memfasilitasi akses permodalan dapat bervariasi tergantung pada berbagai faktor seperti pengalaman pribadi, keberhasilan dalam mengakses modal, dan kualitas layanan yang diterima. Beberapa poin utama yang diungkapkan oleh pelaku UMKM meliputi: (Kusparti, Kepala Bidang Pembiayaan, "Persepsi Pelaku UMKM terhadap Kinerja Dinas Koperasi Kab. Jember", 2025)

1. Ketersediaan Informasi

Salah satu pelaku UMKM mengungkapkan bahwa Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Jember telah menyediakan informasi yang cukup mengenai sumber permodalan yang tersedia, baik melalui seminar, workshop, maupun layanan konsultasi. Namun sebagian pelaku UMKM merasa kurang mendapatkan informasi yang tepat atau merasa kesulitan mengakses informasi tersebut.

2. Proses Pengajuan Modal

Salah satu pelaku UMKM yang berhasil mendapatkan permodalan, dapat menghargai proses pengajuan yang dianggap mudah dan didukung oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Jember. Namun ada beberapa kemungkinan pelaku UMKM mengalami kesulitan dalam proses pengajuan, seperti birokrasi yang rumit atau persyaratan yang sulit dipenuhi.

3. Pendampingan dan Pelatihan

Beberapa pelaku UMKM mengapresiasi program pelatihan dan pendampingan yang diberikan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Jember yang membantu meningkatkan kapasitas dan kompetensi mereka dalam mengelola permodalan. Namun

sebagian pelaku UMKM merasa bahwa pelatihan yang diberikan kurang relevan dengan kebutuhan mereka atau tidak diadakan secara rutin.

4. Dampak pada Usaha

Salah satu pelaku UMKM yang telah mendapatkan permodalan dan merasa usahanya berkembang mungkin memiliki persepsi positif terhadap peran dinas dalam mendukung pertumbuhan usaha mereka. Namun bagi pelaku UMKM yang merasa tidak ada perubahan signifikan setelah mendapatkan permodalan, mereka mungkin memiliki persepsi negatif terhadap efektivitas program Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Jember.

5. Ketersediaan Jaringan dan Kolaborasi

Beberapa pelaku UMKM merasa terbantu dengan jaringan dan kolaborasi yang difasilitasi oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Jember, yang membuka peluang baru bagi pengembangan usaha. Namun ada beberapa kemungkinan pelaku UMKM merasa kurang mendapatkan kesempatan untuk menjalin jaringan atau berkolaborasi dengan pihak lain melalui Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Jember.

6. Kepuasan Layanan

Beberapa pelaku UMKM yang merasa puas dengan layanan dan dukungan yang diberikan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Jember akan memiliki persepsi positif terhadap kinerja dinas. Tetapi sebaliknya, beberapa pelaku UMKM yang merasa tidak puas dengan layanan yang diterima mungkin memiliki persepsi negatif terhadap kinerja dinas.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jember dalam memfasilitasi akses permodalan bagi UMKM di wilayahnya adalah sangat penting. Dinas ini telah melakukan berbagai upaya melalui pemberian informasi dan edukasi, pendampingan dan konsultasi, fasilitasi akses ke sumber permodalan, pengembangan program khusus, kolaborasi dengan pihak swasta, serta peningkatan kapasitas dan kompetensi pelaku UMKM. Berbagai program yang telah dilaksanakan menunjukkan efektivitas yang cukup baik, terlihat dari peningkatan jumlah UMKM yang berhasil mengakses permodalan, peningkatan produktivitas dan pendapatan UMKM, serta keberlanjutan usaha yang lebih terjaga.

Namun, tantangan masih ada. Persepsi pelaku UMKM terhadap peran dan kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro sangat bervariasi. Beberapa pelaku UMKM merasa bahwa informasi yang disediakan cukup, proses pengajuan modal mudah, dan pendampingan yang diberikan bermanfaat. Namun, ada juga yang mengeluhkan birokrasi yang rumit, persyaratan yang sulit dipenuhi, serta ketidakrelevanan pelatihan yang diberikan.

Saran

Beberapa masukan dari penulis kepada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Jember untuk meningkatkan kemajuan para pelaku UMKM di Kab. Jember, Antara lain sebagai berikut:

1. Peningkatan Akses Informasi: Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jember perlu meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan informasi mengenai sumber permodalan yang tersedia. Penggunaan media digital dan platform online dapat menjadi solusi efektif untuk menyebarkan informasi kepada pelaku UMKM.
2. Penyederhanaan Birokrasi: Proses pengajuan modal perlu disederhanakan agar lebih mudah dipahami dan diakses oleh pelaku UMKM. Hal ini dapat dilakukan dengan mengurangi persyaratan yang tidak relevan dan mempercepat proses evaluasi pengajuan.
3. Relevansi Pelatihan: Pelatihan yang diberikan perlu disesuaikan dengan kebutuhan nyata pelaku UMKM. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro perlu melakukan survei atau konsultasi untuk mengetahui kebutuhan pelatihan yang relevan dan bermanfaat bagi pelaku UMKM.
4. Pendampingan Berkelanjutan: Program pendampingan dan konsultasi perlu dilakukan secara berkelanjutan dan rutin. Pendampingan tidak hanya dilakukan pada tahap pengajuan modal, tetapi juga dalam tahap pengelolaan dan pemanfaatan modal.
5. Kolaborasi dengan Pihak Swasta: Dinas Koperasi dan Usaha Mikro perlu menjalin lebih banyak kemitraan dengan perusahaan swasta untuk mendukung akses permodalan bagi UMKM. Kolaborasi ini dapat berupa program CSR, modal ventura, atau bantuan teknis yang dapat membantu UMKM berkembang.
6. Pengembangan Jaringan dan Kolaborasi: Dinas Koperasi dan Usaha Mikro perlu memfasilitasi lebih banyak kesempatan bagi pelaku UMKM untuk menjalin jaringan dan berkolaborasi dengan berbagai pihak. Hal ini dapat dilakukan melalui penyelenggaraan pameran, forum bisnis, dan kegiatan networking lainnya.

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jember dalam memfasilitasi akses permodalan bagi UMKM dapat semakin efektif

dan memberikan dampak positif yang lebih besar bagi pertumbuhan dan keberlanjutan UMKM di wilayah tersebut.

DAFTAR REFERENSI

- “7 Jenis Akses Pembiayaan bagi Pemilik UMKM.” (2023, Juni 15). Retrieved from Run Market: <https://runmarket.id/blog/akses-pembiayaan/#:~:text=Akses%20pembiayaan%20mengacu%20pada%20kemampuan,untuk%20memenuhi%20kebutuhan%20keuangan%20mereka.>
- “7 Sumber Modal Usaha untuk Memulai Bisnis.” (2022, Desember 14). Retrieved from Amarta: <https://amartha.com/blog/usaha-mikro-ukm/tips-bisnis/7-sumber-modal-usaha-untuk-memulai-bisnis/>
- “Kontribusi UMKM dalam Perekonomian Indonesia.” (2023, Juni 26). Retrieved from Kementerian Keuangan RI: <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/lubuksikaping/id/data-publikasi/artikel/3134-kontribusi-umkm-dalam-perekonomianindonesia.html>
- “Modal dan Permodalan dalam Bisnis: Definisi dan Contoh.” (2023, Maret). Retrieved from sibebi.com: <https://sibebi.com/home/modal-dan-permodalan-dalam-bisnis-definisi-contoh/?form=MG0AV3>
- “Program Dan Kegiatan Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kabupaten Jember Tahun 2019.” (2019, Oktober 29). Retrieved from Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia: <https://diskopum.jemberkab.go.id/posts/program-dan-kegiatan-dinas-koperasi-dan-usaha>
- “Sosialisasi Akses Permodalan Bagi Koperasi dan UMKM di Kabupaten Katingan.” (2024, Juli 28). Retrieved from Dinas Koperasi dan UKM Kalimantan Tengah: <https://diskopukm.kalteng.go.id/berita/detail/sosialisasi-akses-permodalan-bagi-koperasi-dan-umkm-di-kabupaten-katingan#:~:text=Akses%20permodalan%20bertujuan%20untuk%20membantu,usaha%20ke depan%20agar%20lebih%20terkontrol.>
- Afra, F. (2023, September 17). Koperasi adalah: Pengertian, asas, prinsip, jenis, fungsi, dan tujuan. Retrieved from <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6934967/koperasi-adalah-pengertian-asas-prinsip-jenis-fungsi-dan-tujuan?form=MG0AV3>
- Kusparto, T. (2025, Februari 3). Presepsi pelaku UMKM terhadap peran dan kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam memfasilitasi akses permodalan. (R. Siti & D. L. Vita, Interviewers)
- Mohamadi, R. F. (2024, November 6). Pengertian, jenis dan pengembangan UMKM di Indonesia. Retrieved from Mekari Jurnal: <https://www.jurnal.id/id/blog/apa-itu-arti-yang-dimaksud-pengertian-umkm-artinya-adalah/#:~:text=Ciri%2DCiri%20UMKM,atau%20melalui%20jaringan%20yang%20terbatas.>

- Najib, A., & Mursyidah, L. (2023). Peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam pemberdayaan usaha mikro. *Jurnal Ilmu Administrasi & Sosial*, 139-152. <http://ejournal.unmus.ac.id/index.php/societas>.
- Prasya, I. (2024, September 15). Apa itu praktik pengalaman lapangan (PPL). Retrieved from <https://studiliv.com/praktik-pengalaman-lapangan/?form=MG0AV3>
- Putri, E. H. (2017). Efektivitas pelaksanaan program pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Kota Samarinda (Studi pada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Samarinda). *Jurnal Administrasi Negara*, 5431-5445. ejournal.an.fisip-unmul.ac.id.
- Ramadanti, T. A., & Suharti. (n.d.). Peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jember untuk kemajuan UMKM. Retrieved from <https://123dok.com/document/y4w1xlok-peran-dinas-koperasi-usaha-mikro-kabupaten-jember-kemajuan.html>
- Sadiyah, R. (2023). Peran atau pengaruh UMKM Dinas Koperasi dan Usaha Mikro terhadap perkembangan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Kab. Jember. *Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 88-91. <https://doi.org/10.59435/gjmi.v2i3.388>.
- Shafarosa, L. A., Rasyifa, R. P., Maldivda, D., & Rudiana. (2024). Akses dan tantangan dalam permodalan bagi UMKM oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bandung. *Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*. <https://publisherqu.com/index.php/Al-Furqan>.
- Shaid, N. J., & Idris Muhammad. (2023, September). Pengertian UMKM, kriteria, ciri dan contohnya. Retrieved from <https://money.kompas.com/read/2022/01/19/051518426/pengertian-umkm-kriteria-ciri-dan-contohnya?page=all#:~:text=3.,restoran%20besar%2C%20hingga%20toko%20b>
- Sinta, D., & Fadillah, Z. N. (2024). Optimalisasi peran Dinas Koperasi dan UMKM dalam meningkatkan pelayanan publik melalui program 4P guna terwujudnya kesejahteraan masyarakat Kota Semarang. *Community Development Journal*, 3389-3397. journal.universitaspahlawan.ac.id.
- Soebiantoro, & Nik, H. (2024). Peningkatan akses permodalan bagi usaha mikro kecil menengah (UMKM). *Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora*, 122-136. <https://doi.org/10.35457/transgenera.v1i2.3795>.